## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada Tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”. Hak Asasi Manusia khususnya di bidang sipil dan politik selanjutnya dikukuhkan melalui *Kovenan* Internasional Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Right)* yang mulai berlaku sejak tahun 1976.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 F yang telah diamandemen berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang [Keterbukaan Informasi](http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/) [Publik](http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak warganya. Dalam dasar pertimbangannya, undang-undang ini mengakui bahwa informasi adalah kebutuhan bagi setiap warga untuk pengembangan pribadi dan lingkungannya. Informasi juga merupakan alat ketahanan negara. Dengan demikian, negara mengakui bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis.

Perilaku negara melalui badan publiknya akan berakibat pada kepentingan publik. Untuk itu akses publik terhadap informasi publik merupakan pra kondisi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-undang adalah norma hukum. Munculnya sebuah norma hukum tentang keterbukaan informasi publik (*Das sollen*) menandakan bahwa dalam praktek bernegara (*Das sein*) sering terjadi sengketa yang melibatkan masyarakat dengan badan publik dalam hal mengakses informasi publik.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Pada Poin ke-13 dari Lampiran Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) untuk mengambil peran melalui strategi penguatan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan keterbukaan informasi adalah salah satu upaya untuk membuka informasi kepada masyarakat luas.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dalam Pasal 3, huruf g. adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Regulasi tersebut menekankan pentingnya akses dan partisipasi masyarakat agar terwujud transparansi publik, terutama mencakup sumber-sumber informasi publik melalui proses partisipasi aktif.

Antusiasme atau keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi kepada badan publik sangat luar biasa. Mereka ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Badan Publik terkait kebijakan dan program kegiatan yang berdampak bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, selama tahun 2019 terdapat beberapa sengketa informasi. Ada sekelompok masyarakat yang mengindikasikan bahwa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka mempertanyakan mengenai proyek pembangunan infrastuktur dan lain sebagainya. Keingintahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahaan desa setidaknya menjadi gambaran bahwa masyarakat ingin mengetahui informasi yang dilakukan badan publik.

Bahkan di beberapa tempat, masyarakat juga ingin mengetahui penggunaan dana BOS oleh sekolah. Masyarakat menilai bahwa buku pelajaran sudah menjadi keharusan untuk disediakan oleh sekolah. Dalam kanal aduan yang bernama *Sapamas*, aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar juga mencatat, masyarakat ingin tahu berbagai hal. Hal yang banyak ditanyakan akhir-kahir ini adalah jadwal vaksin terkait pandemi *Covid-19*, syarat menerima bansos dan lain sebagainya. Keingintahuan dari masyarakat hendaknya dikemas dengan sebuah aturan yang menjembatani antara pencari informasi dan penyedia informasi.

Diharapkan, adanya peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengatasi permasalahan hukum terkait informasi. Pihak pencari informasi dapat mencari kepada sumber-sumber yang terpercaya dan sesuai *Standart Operational Procedure* yang ada. Demikian sebaliknya, penyedia informasi dalam hal ini badan publik menyiapkan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan baik dan akurat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dimungkinkan daerah membentuk aturan atau perda. Dalam Pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Pasal 12 ayat 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan dalam urusan permintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika tersebut, seyogyanya pemerintahan memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika.

Dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dengan kata dapat diakses itu berarti memberikan gambaran bahwa badan publik harus memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut Pasal 3 adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Diharapkan dengan mengetahui informasi tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dan mendorong masyarakat dalam mengambil keputusan.

Bukan itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sesuai amanat Undang-Undang ini diharapkan dalam meminta informasi tetap menggunakan kaidah-kaidah aturan yang ada, tidak boleh penggunaan informasi itu untuk mendeskriditkan atau menyudutkan seseorang.

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) disebutkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format. Sedangkan ayat 4 menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam Pasal tersebut dijelaskan ketentuan informasi publik.

Dalam Pasal 2 disebutkan memberikan standar bagi Badan publik untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dan meningkatkan pelayanan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Sedangkan dalam Pasal 4, badan publik menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi publik sesuai dengan aturan. Kewajiban badan publik adalah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien. Dalam pelayanan publik memang perlu standar prosedur layanan informasi kepada publik dan dapat mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang perlu dierbitkannya sebuah Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar yang juga memuat standar operasional layanan informasi publik serta prosedur untuk memperoleh informasi yang baik.

1. **Identifikasi Masalah**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai hak warga untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Selanjutnya apabila dirasakan ada hambatan/kegagalan dalam memperoleh informasi publik, Undang-Undang tersebut mengatur cara penyelesaiannya. Ada relasi dua pihak yang harus diatur, yaitu masyarakat dan pemerintah (Badan Publik) di tingkat pusat hingga daerah. Apabila terdapat ketidakpuasan dalam relasi tersebut, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Di tingkat daerah, relasi ini harus diatur dan disiapkan perangkat peraturannya. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kompetensi birokrasi, perangkat kelembagaan serta perangkat lunak untuk mengantisipasi para pihak yang meminta akses informasi publik. Beberapa hal yang perlu disiapkan berkaitan dengan permasalahan di tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Pengertian dan kesadaran para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu masyarakat serta aparatur di seluruh badan publik di Kabupaten Karanganyar bahwa informasi publik bersifat terbuka dan siapapun bisa mengaksesnya sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Hak dan kewajiban publik dalam menerapkan kebebasan informasi publik. Seringkali publik hanya menuntut haknya, namun melupakan kewajiban yang harus dipenuhinya.
3. Mekanisme publik untuk memperoleh informasi publik dari badan publik. Mekanisme ini perlu diatur dalam sebuah SOP demi kepastian dan efisiensi kerja masing-masing pihak.
4. Hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik. Pandangan bahwa publik tidak seharusnya mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik masih sering melekat dalam pikiran personil badan publik. Anggapan ini harus diubah melalui penjelasan yang diatur dalam sebuah peraturan.
5. Infrastruktur badan publik dalam melayani permohonan informasi publik. Infrastruktur dalam artian penyiapan perangkat untuk mempermudah badan publik dalam menyediakan informasi publik serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
6. Perangkat Hukuman (*punishment*) karena pelanggaran sebuah undang-undang tentu ada aturan hukumnya serta mekanisme penyelesaian sengketa.
7. **Maksud, Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah akademik ini bermaksud untuk:

a. Menjelaskan landasan filosofis mengenai perlunya sebuah peraturan di tingkat daerah tentang Kebebasan Informasi Publik.

b. Menjelaskan dari sudut pandang akademis tentang hak masyarakat untuk tahu (*Right to Know*) serta implementasinya pada kehidupan bernegara khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar

c. Menjelaskan kewajiban negara (badan publik) berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk tahu informasi publik.

d. Menjelaskan hakikat informasi, pengetahuan dan partisipasi warga negara dalam proses bernegara yang dijalankan.

Tujuannya adalah

a. Memberikan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar.

b. Memberikan arahan tentang para pihak yang berkepentingan dalam Perda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar.

c. Memberikan poin-poin bahasan yang perlu dimasukkan dalam Perda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar.

1. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yakni menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif dan penelitian hukum sosiologis/*empiris* yaitu mempergunakan semua metode dan tehnik- tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial/*empiris*. Kajian penelitian normatif, dalam beberapa penelitian disebut dengan penelitian *dogmatik.*

Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, kamus bahasa hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian sosiologis, data primer berasal dari analisa data hasil penyebaran kuesioner dan wawancara terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan tersebut maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, yakni pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach).*

Pendekatan perundang-undangan (statute *approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaan pemerintahan dan layanan informasi publik di daerah. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pemikiran dan pandangan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan penelitian ini. Di samping itu juga digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memilikir elevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan *ensiklopedia.*

Di samping itu, pengumpulan data dan informasi tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung pada pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi.

Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki kapabilitas untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji, yang dalam penelitian ini adalah pengelolaan, penyediaan, dan layanan informasi publik. sehingga informasi yang didapatkan akan lebih banyak, tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon (1994) mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji.

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

1. **Kajian Teoritis**
   1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Pelayanan Publik**

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamanannya terhadap fakta-fakta yang ada. Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pemkab Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menujuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komitmen Pemkab Karanganyar terhadap Keterbukaan Informasi Publik sudah dimulai sejak tahun 2017. Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegial. Dimana telah ditunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID Pembantu. Hadirnya PPID Pembantu ini memberikan pelayanan permintaan Informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi PD tersebut. Masyarakat yang menghendaki memperoleh informasi tertentu, PPID utama mendelegasikan jawaban kepada PD terkait.

Informasi yang diminta masyarakat dapat dilayani dengan baik. Pada prinsipnya Pemkab Karangantar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemkab Karanganyar diunggah di situs resmi [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id). Selain itu, Pemkab Karanganyar juga memiliki website dengan alamat ppid.karanganyarkab.go.id.

Bukan hanya itu, Pemkab juga melaunching beberapa layanan yang dapat diakses masyarakat umum seperti E-KIR Sibanter (Sistem Bantuan Non Tunai Kendaraan Bermotor), Simade (Sistem Informasi Manajemen Desa), SI Cerdik (Sistem Informasi Cerdas Mendidik), Semarak (Sistem Online Pasar Rakyat Karanganyar), E-Gampang Perizinan (Sistem Informasi Perizinan Online), Loket 99 (Layanan Kependudukan Berbasis elektronik, GRMS Kabupaten Karanganyar menyangkut e-planing, e-budgeting dan sinarga. Dengan berbagai strategi tersebut di atas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah disediakan oleh Pemkab Karanganyar sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Selain berbagai akses informasi publik, Pemkab Karanganyar juga telah membuka layanan media sosial seperti Instagram, emai, twitter dan facebook dan aduan online seperti sapamas.karanganyarkab.go.id. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat sekitar 112 personel, diantaranya merupakan PPID Pembantu yang berada di seluruh organisasi perangkat daerah.

* 1. **Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Kabupaten Karanganyar dihimpun di bidang pengolahaan Data dan Klasifikasi Informasi yang dikelola kepala Bidang Tata Kelola Informatika serta beberapa staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rapat koordinasi PPID. PPID Utama yang dijabat oleh Sekretaris DInas Komunikasi dan Informatika akan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada unit kerja yang menguasai informasi publik (PPID Pembantu). Kemudian staf sekretariatan PPID Kabupaten akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke PD.

* 1. **Rincian Pelayanan Informasi Publik Masing-masing Badan Publik Tahun 2020**

Pada tahun 2020 Tim PPID Kabupaten Karanganyar menerima permintaan informasi sebanyak 2.201. Permintaan terbanyak pertama ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPU PR) sebanyak 611 permintaan informasi. Disusul kemudian permintaan terbanyak kedua adalah RSUD berjumlah 317. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Organisasi Perangkat Daerah**  **(OPD)** | **JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020** | |
|
| 1 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | 11 | |
| 2 | Inspektorat | - | |
| 3 | Baperlitbang | - | |
| 4 | Disparpora | 11 | |
| 5 | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | 46 | |
| 6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 24 | |
| 7 | Disdagnakerkop | Nihil | |
| 8 | Dinas Perhubungan | 10 | |
| 9 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7 | |
| 10 | Kecamatan Karangpandan | 23 | |
| 11 | Satpol PP | 6 | |
| 12 | Disdukcapil | 17 | |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 75 | |
| 14 | Dispermades | - | |
| 15 | Kecamatan Jaten | 3 | |
| 16 | RSUD | 317 | |
| 17 | Dinas Sosial | Nihil | |
| 18 | BKPSDM | 13 | |
| 19 | BPBD | 12 | |
| 20 | BKD | 25 | |
| 21 | Sekretariat Daerah | 40 | |
| 22 | DPU PR | 611 | |
| 23 | Kecamatan Tawangmangu | 3 | |
| 24 | Kecamatan Tasikmadu | Nihil | |
| 25 | Kecamatan Kerjo | - | |
| 26 | Kecamatan Matesih | Nihil | |
| 27 | Kecamatan Jatipuro | Nihil | |
| 28 | Kecamatan Colomadu | 7 | |
| 29 | Kecamatan Jumapolo | Nihil | |
| 30 | DPMPTSP | 4 | |
| 31 | Kecamatan Jenawi | 9 | |
| 32 | Kecamatan Jumantono | - | |
| 33 | Kecamatan Kebakkramat | Nihil | |
| 34 | Dinas Kesehatan | 32 | |
| 35 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 24 | |
| 36 | Kecamatan Jatiyoso | - | |
| 37 | Kecamatan Karanganyar | 9 | |
| 38 | Kecamatan Gondangrejo | Nihil | |
| 39 | Setwan | - | |
| 40 | DP3AKB | 20 | |
| 41 | Kecamatan Mojogedang | Nihil | |
| 42 | Kecamatan Ngargoyoso | - | |
| 43 | PDAM Tirta Lawu | - | |
| 44 | SAPAMAS | 888 | |
| **TOTAL** | | | **2.201** |

* 1. **Landasaan Teoritis**

Secara Etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu *informationem* yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas. Aktivitas dalam hal ini maksudnya adalah “pengetahuan yang dikomunikasikan”. Sedangkan menurut definisi informasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuaan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Sedangkan menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013:2) informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolah tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah informasi bagi orang tersebut.

Pengertian informasi yang lain seperti diungkapkan Hiro Tugiman (1996:32) yang manyatakan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahaan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini mengambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari Informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara, sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.

Selain itu, E. Koswara (1998:157) mengatakan bahwa informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori (Hatifeh SJ, Sumarto (2009:12).

Di dalam buku Wirman Syafri (2012:15) publik adalah kolompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagai rasa atas dasar kebersamaan.

Menurut Yogi Suprayogi Sugandi (2011:33) publik berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik.

Pengertian Informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli. Menurut Suryanti (200:6) dalam jurnal Ade Suhendar informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.

Menurut Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelengaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selanjutnya, George R. Terry berpendapat bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Sedangkan informasi diartikan sebagai data yang memiliki pengetahuan yang berguna. Setiap badan publik harus memiliki data pengetahuan yang layak diketahui oleh publik.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah :

1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan.
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti. Informasi yang baik dan memenuhi persyaratan adalah lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya dan masih aktual *(up to date).*

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi ialah :

1. relevan;
2. lengkap/mendetail;
3. baru;
4. sesuai dengan tempat; dan
5. tidak melanggar efisiensi kerja.

Selain yang tersebut di atas, menurut Johnson diharapkan informasi itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. integratif,
2. untuk jangka waktu tertentu,
3. cukup mendetail, dan
4. berorientasi pada masalah yang akan datang.
5. **Keterbukaan Informasi Publik Secara Umum**

Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik. Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar.

Jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

* 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:
     + Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
     + Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
     + Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
     + Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah :
     + Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak.
     + Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini di antaranya adalah:
     + Daftar seluruh Informasi negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang publik yang berada di bawah penguasaannya;
     + Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
     + Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dengan alasan keterbukaan informasi publik.

Terdapat beberapa jenis informasi yang tidak dapat dibuka begitu saja oleh pemerintah karena mengandung resiko. Jenis- jenis informasi tersebut adalah:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sekarang siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan G*ood Governance* yang diharapkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan terhadap penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya *Good Governance* di Indonesia. Kata *Governance* artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 (dua) aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua prinsip di atas akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Keterbukaan informasi publik ini adalah titik awal yang baik untuk transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
8. **Keterbukaan Informasi Publik : Dari Teori Menuju Aplikasi**

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara” (Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB).

Munculnya gagasan tentang kebebasan memperoleh informasi publik merupakan implikasi semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politiknya. Kesadaran ini selaras dengan terjadinya perubahan sistem politik nasional pada tahun 1998. Selain itu kesadaran ini juga dipicu oleh adanya dorongan pemikiran dan gerakan yang sama pada tingkat global. Berbagai elemen masyarakat madani yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mengajukan usul perlunya undang-undang yang memayungi persoalan ini. (Jebarus, Felix : 2014).

Saat proses penyusunan, ketika masih menjadi RUU secara yuridis pengajuan RUU (Rancangan Undang-Undang) Keterbukaan Informasi Publik dianggap selaras dengan Undang Undang Dasar 1945, Tap MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR RI No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Jebarus, Felix : 2014).

Teks hukum yang pada akhirnya menjadi UU No 14 Tahun 2008 ini adalah produk dari kontestasi pemaknaan terhadap kebebasan informasi publik. Dasar dari pertarungan ini adalah pertarungan simbolik yang disebabkan adanya perbedaan pandangan dunia, perbedaan sudut pandang, perbedaan nilai- nilai yang kemudian melahirkan pertarungan untuk mendapatkan legitimasi.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.(Setiawan, Sugiana, dll: 2013)

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi saat ini ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah. Sementara akses warga masyarakat semakin terbatas, karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya “*patron-klien*” antara elite birokrasi di pemerintahan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan berbagai kebijakan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki individu dimana pun mereka berada. Bahkan ciri dari negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah:

* 1. Menjamin hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya;
  2. Menjamin publik untuk mendapatkan informasi;
  3. Menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik;
  4. Menjamin publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran;
  5. menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas; dan menjamin publik untuk mengajukan keberatan. (Jebarus, Felix : 2014).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Dalam Undang-Undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, setiap lembaga atau Badan Publik harus menyediakan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Undang-Undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan Undang-Undang tersebut dapat tercapai.

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance,* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi. Ada dua orientasi dalam pemerintahan yang baik. Pertama, orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintah harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional. (Indah, Tiara dan Hariyanti, Puji 2018).

Pemerintahan yang bersih dan efisien mensyaratkan pemerintahan yang terbuka. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Sementara pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan *partisipatoris*. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan pelaksanaan secara efisien. (Jebarus, Felix : 2014).

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Febriananingsih, 2014: 138). UU KIP menjadi landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU KIP semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik. (Febriansah, Nunuk 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiaman, Dadang Sugiana dan Jimi M Narotama tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Bandung menemukan data implementasi sebagai berikut. Pemerintah Kota Bandung di antaranya (1) warga kota membutuhkan informasi tentang berbagai masalah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap rencana, pelaksanaan bahkan evaluasinya, (2) infomasi yang diberikan seringkali kurang dipahami oleh warga kota karena informasi yang diberikan seringkali bersifat teknis, atau teknis prosedural yang seringkali menyulitkan dalam memahami informasi seperti itu, (3) memberikan informasi yang teknis, yuridis, dan birokratis bersifat kaku (rigid) sehingga seringkali kurang menarik, menjemukan, sehingga sering dianggap tidak penting atau masa bodoh, (4) kebutuhan informasi bagi warga kota adalah informasi yang menarik, jelas, ringkas dan tidak bertele-tele atau *to the point* disajikan dengan menggunakan gambar-gambar yang lucu dan berwarna, dan (5) warga kota berharap bahwa Pemerintah Kota dapat mengikuti perkembangan keinginan dan harapan warga kota dalam setiap kebijakan pemerintah Kota Bandung sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dapat diapresiasi oleh warga kotanya.

Persepsi kebutuhan warga yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bahwa apa yang diberikan Pemerintah Kota Bandung di antaranya (1) persepsi warga kota terhadap eksplorasi kebutuhan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung selama ini dianggap masih minim, (2) warga kota membutuhkan informasi yang menunjukkan keterbukaan infomasi tentang penggunaan anggaran dan besaran anggaran yang digunakan sehingga bisa menilai kelayakan proyek dengan besaran anggaran yang digunakan, (3) warga kota menginginkan bahwa keterbukaan informasi dapat menjadi sebuah tradisi penyelenggara pemerintah sehingga pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan yang saling mengawasi dan saling mengisi, dan (4) kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai sarana demokrasi yang bercirikan dari, oleh, dan untuk rakyat, benar-benar dapat diterapkan karena selama ini ada anggapan bahwa demokrasi hanya menitikberatkan pada dari dan oleh saja, karena untuk rakyat seringkali para penyelenggaran pemerintah lupa atau pura-pura lupa.

Penelitian Agus Setiaman, Dadang Sugiana dan Jimi M Narotama juga menemukan bahwa optimalisasi sumberdaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung di antaranya (1) Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah kota, walaupun penggunaan relasi kemitraan masih banyak dilakukan melalui jalur birokrasi tapi masih saja hal itu belum juga optimal, (2) optimalisasi lembaga publik yang memberikan layanan informasi kepada warga kota masih juga belum optimal, padahal lembaga publik ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai tapi masih juga belum diapresiasi oleh warga kota, dan (3) perlu perubahan pola pikir di kalangan birokrat bahwa aparatur pemerintah bukan dilayani tapi harus melayani warga kota. Hal ini bukan hanya dijadikan sebagai penghias bibir saja tapi betul-betul diterapkan. Untuk itu hal tersebut perlu dimulai dari birokrasi di kalangan atas lebih dahulu. Pemimpin perlu memberikan contoh bagi aparaturnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Agus Setiaman, Dadang Sugiana dan Jimi M Narotama ini merupakan kontribusi berharga tentang bagaimana keterbukaan informasi publik seharusnya di-*break down* dari teori menuju implementasi dalam tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik. (Setiawan, Sugiana, dll: 2013)

Penelitian lain yang dilakukan Kusma Supriatna menemukan bahwa terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap pemohon, yaitu yang bersifat positif dan negatif. Makna positif adalah PPID menyebut PPID sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan sebagai pihak yang menggunakan haknya untuk tahu tentang kegiatan pemerintahan. Sedangkan makna negatif dari PPID terhadap pemohon informasi adalah pemohon informasi sebagai pihak yang asal-asalan, berlebihan dan berlebihan dalam mengajukan permohonan informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan tersebut adalah tingkat keseringan mengalami proses sengketa informasi di Komisi Informasi, sifat permohonan yang diajukan pemohon dan cara pemohon mengajukan permohonan. PPID yang lebih sering mengalami proses sengketa informasi, sifat permohonan yang dilayangkan pemohon bersifat positif cenderung menilai positif pemohon informasi, sedangkan PPID yang hanya satu kali mengalami sengketa, apabila menerima permohonan informasi, cenderung dianggap menyudutkan dan berlebihan. PPID yang tidak memiliki aktivitas di luar kantor cenderung menilai negatif pemohon informasi. Bersifat positif artinya, PPID memaknai pemohon informasi sebagai pihak yang mengajukan permohonan informasi karena memang benar-benar membutuhkan informasi yang dimintakan. PPID melayani pemohon informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bersifat negatif berarti, PPID memaknai pemohon informasi yang memiliki tujuan bukan untuk mendapatkan informasi, tetapi, memohon informasi dengan alasan undang-undang tetapi memiliki tujuan lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusma Supriatna ini menjadi signifikan untuk menempatkan posisi PPID agar bermakna positif bagi pemohon.

1. **Pengelolaan Media Sosial untuk Pelayanan Publik**

Pemerintah di era modern ini mengahadapi publik yang tidak lagi pasif saja namun lebih aktif dan proaktif mengawasi kinerjanya. Selama kurun waktu 2012 hingga 2014, Ombudsman mencatat terdapat peningkatan jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebesar 350 persen. Peningkatan kritisme masyarakat ini merupakan sinyal positif pemerintah di dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang lebih baik. Media sosial kemudian hadir sebagai jawaban yang dinilai tepat atas kebutuhan jembatan komunikasi tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menunjukan sebuah indikasi positif mengenai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau dikenal sebagai *good governance. Good governance* merupakan kondisi pemerintahan yang menekankan pada peran semua elemen negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Guna mencapai kondisi tersebut, pemerintah kini berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan membuat jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik.

Media sosial dipilih pemerintah sebagai jembatan komunikasi tersebut sebab kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Ada 3,48 miliar pengguna media sosial pada tahun 2019, dengan total dunia meningkat 288 juta (9 persen) sejak saat ini tahun lalu. 3,26 miliar orang menggunakan media sosial pada perangkat seluler pada Januari 2019, dengan pertumbuhan 297 juta pengguna baru mewakili peningkatan tahun-ke-tahun lebih dari 10 persen. (<https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia?rq=indonesia>)

Data untuk Indonesia dapat dicermati dalam gambar berikut:

**Gambar 1.** Pertumbuhan Pengguna Media Sosial dan Digital di Indonesia

Sumber: [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\_detail&sub=PenelitianDetail&act=vie](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&amp;amp%3Bsub=PenelitianDetail&amp;amp%3Bact=view&amp;amp%3Btyp=html&amp;amp%3Bbuku_id=91499&amp;amp%3Bobyek_id=4) [w &typ=html&buku\_id=91499&obyek\_id=4.](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&amp;amp%3Bsub=PenelitianDetail&amp;amp%3Bact=view&amp;amp%3Btyp=html&amp;amp%3Bbuku_id=91499&amp;amp%3Bobyek_id=4)

Media sosial melalui *mobile* meningkat sebesar 19%. Kondisi ini merupakan peluang yang apabila dimanfaatkan dengan benar, mampu membuat media sosial menjadi salah satu jawaban efektif komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat guna membangun pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, didalamnya dijelaskan terdapat langkah-langkah pelaksanaan media sosial terdiri dari delapan elemen. Pertama ialah menetapkan khalayak sesuai segmentasi teknografis dan perencaaan yang telah dilakukan. Kedua, memilih dan membuat media sosial ataupun akun media sosial yang sesuai dengan khalayak. Ketiga, membuat dan mengunggah pesan. Pesan yang telah direncanakan dibuat dan diunggah, dimasukan ke dalam media sosial. Keempat, memantau percakapan yang terjadi. Melihat percakapan yang terjadi dan mengamatinya, langkah ini diperlukan untuk menjawab. Langkah kelima yaitu berinteraksi dengan khalayak, menjawab komentar, masukan dan atau pertanyaan dari khalayak. Keenam, menganalisa dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik pembuat kebijakan.

Pada tahap menganalisis dan menyarikan ini, saran, masukan dan partisipasi lain dari khalayak perlu dikategorikan dengan rapi dan jelas, tanpa mengurangi, menambah atau mengubah makna pesan sesungguhnya. Saran, komentar dan pertanyaan ini kemudian diteruskan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambil keputusan. Setelah itu, langkah ketujuh adalah memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau solusi atas masukan dan atau keluhan masyarakat yang telah masuk dan diproses tadi.

Langkah terakhir atau kedelapan ialah menyebarluaskan kebijakan atau tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Setelah itu terdapat pula pemantauan media sosial juga dikenal dengan istilah penyimakan sosial. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan dan aktivitas yang ada di media sosial. Pemantauan ini digunakan untuk mengukur kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak terhadap instansi. Misalnya saja media sosial dikelola oleh pemerintah pusat untuk menerima aduan dan aspirasi masyarakat. Melalui pemantauan media dapat dilihat isu-isu apa yang menjadi laporan atau aduan terfavorit. Kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bidang mana yang perlu mendapat perhatian lebih bisa dilihat dari perbincangan di media sosial. Pemantauan dilakukan terus-menerus dan secara *real time* sehingga instansi pemerintah dapat memantau pergerakan naik-turunnya kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak kepada instansi.

1. **Komisi Informasi**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi. Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi.

Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap diperlukan. Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggung jawab kepada DPR atau DPRD, selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi. Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksananya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik. Lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tata cara mendapatkan informasi publik.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat dapat mengajukan mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami tata cara mengajukan keberatan atau sengketa informasi apabila permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Badan publik atau tidak puas dengan jawabannya.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penyelesaian melalui komisi informasi. Terdapat beberapa alasan atau penyebab mengapa sengketa informasi dapat terjadi antara lain:

* 1. Penolakan permintaan Informasi Publik (IP) dengan alasan pengecualian;
  2. Tidak disediakannya Informasi Publik (IP) secara berkala;
  3. Tak ditanggapinya permintaan Informasi Publik (IP);
  4. Permintaan Informasi Publik (IP) tidak ditanggapi sebagaimana diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Dengan adanya sengketa informasi, harus dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Produk dari penyelesaian sengketa informasi ini adalah putusan yang sebanding dengan putusan tingkat pertama. Jika para pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Banding dan Kasasi. Selain itu putusan Komisi Informasi juga dapat berasal dari hasil kesepakatan damai antara para pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana dapat dilihat pada alur diagram di bawah ini :



**Gambar 2.** Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana

Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah juga melibatkan panitera di dalamnya. Panitera ini terdiri dari Panitera yang melakukan pencatatan saat permohonan penyelesaian sengketa informasi dan panitera pengganti yang bertugas selama proses persidangan hingga keluarnya putusan Komisi Informasi. Keberadaan Panitera ini masih menjadi bagian dari sekretariat Komisi Informasi dan belum diatur lebih lanjut.

1. **Partisipasi Publik**

Pemerintahan demokratis adalah kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan *soveriegthy* ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Proses pemilihan untuk mendapatkan kedudukan sebagai wakil rakyat maupun mendapatkan mandat sebagai pemimpin maka demokrasi dapat diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan sehingga proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi.

Partisipasi ini tidak hanya dalam wujud proses pemilihan pemimpin namun dalam proses penyelenggaraan negara. Soetrisno mendefenisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah dan tujuannya yang ditentukan oleh pemerintah. (Soetrisno, Lukman. (1995). Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, Diana. (1994) yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa masyarakat diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai.

Partisipasi menurut Sri Hariyani (2017) diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa. Dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) Partisipasi Politik (*political participation*), lebih berorientasi pada ”mempengaruhi” dan ”mendudukkan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri. 2) Partisipasi Sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary* atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. 3) Partisipasi warga atau *citizen participation/citizenship* yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan.

Tingkat partisipasi ini juga terkait dengan adanya transparansi. Payung hukum transparansi ini diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asshidiqie dalam Edwin Nurdiasyah24 menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa pada era baru yang disebut sebagai era digital (*digital era*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan TIK tersebut. Bahkan di Indonesia Pemerintah telah membuat peta jalan “Making Indonesia 4.0” sebagaimana diluncurkan Presiden Jokowi pada Indonesia Industrial Summit 2018, yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Bahkan selain itu, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2019 yang lalu, Presiden telah secara tegas menyampaikan visi Indonesia 2045 yang menghendaki Indonesia menjadi salah satu barometer ekomomi dunia.5 Ini menunjukkan ke depan Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pemimpin negara-negara di dunia, sehingga harus cepat mersepon perkembangangan yang terjadi di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan TIK kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Di era revolusi industri 4.0 ini internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah *Internet of Things* (IoT) yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena sejatinya IoT adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0. Fungsi utama IoT adalah sebagai data miner yang bekerja mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih bermanfaat. Data inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam “The Economist”, mingguan terkemuka Inggris pada Mei 2017 ditulis sebuah tajuk berjudul “*The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil But Data*”. Artinya data memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia pada abad ini (Komisi Informasi Pusat, 2019).

1. **Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. (Maria Farida Indrati 2015). Norma pada dasarnya mengatur tata acara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma mengandung perintah atau suruhan atau *das sollen (ought to be/ought to do)* atau perintah yang harus dilaksanakan. Norma terkandung di dalam hukum, dan sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuk atau menghapusnya. Hukum akan sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hirarki. (Maria Farida Indrati 2015) Dalam penyusunan norma terdapat asas-asas yang menjadi pedoman atau rambu-rambu. Asas-asas tersebut terkait dengan: isi peraturan (*inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*methode der Ausarbeitung der Regelung*), dan prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)34 Prinsip penyusunan norma yang digunakan dalam penyusunan produk hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa produk hukum daerah dapat berbentuk peraturan dan penetapan. Peraturan Daerah (Perda) sendiri merupakan salah satu produk hukum yang berbentuk peraturan seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Muatan Perda mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

* 1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
  2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. Asas-asas tersebut antara lain :
   1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
   2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing- masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dari lembaga legislatif.
   3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
   4. Asas dapat dilaksanakan

Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.

* 1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif) Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.
  2. Asas kejelasan rumusan, norma yang diatur harus jelas rumusannya, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
  3. Asas keterbukaan

Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik.

Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Asas - asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:

1. Asas pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Bhinneka Tunggal Ika;
6. Keadilan;
7. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
8. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau
9. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Dari berbagai asas-asas tersebut, asas yang digunakan adalah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

Pertama, asas penganyoman. Yang dimaksudkan dengan asas penganyoman dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa Keterbukaan Informasi Publik harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berarti bahwa bahwa muatan peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi publik harus mampu menciptakan ketentraman dalam pengelolaan informasi publik.

Kedua, asas kekeluargaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola informasi publik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam sengketa informasi publik, asas kekeluargaan ini diwujudkan dengan adanya mediasi.

Ketiga, asas kenusantaraan. Yang dimaksud dengan adanya asas kenusantaraan dalam peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar adalah bahwa setiap materi peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materinya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, terutama karena Kabupaten Karanganyar adalah wilayah yang multikultural dengan banyaknya warga dari luar wilayah Karangnyar yang tinggal di Karanganyar, terutama dengan tujuan menuntut ilmu maupun bekerja.

Keempat, asas keadilan, yang berarti bahwa peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi publik harus meninggalkan budaya *ewuh pakewuh* dalam birokrasi yang menyebabkan adanyanya hambatan dalam keterbukaan informasi publik yang berujung pada terjadinya ketidakadilan. Melalui tata kelola keterbukaan informasi publik, keadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tata kelola keterbukaan informasi bisa tercapai. Sebagaimana tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik dalam menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, maka peraturan daerah tentang tata kelola informasi publik harus memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal-hal tersebut.

Kelima, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa dalam tata kelola keterbukaan informasi publik, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Berkaitan dengan asas ini, tata kelola keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karanganyar harus diarahkan tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang tersebut dan status sosial pemohon informasi publik.

Keenam, asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksudkan di sini adalah rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik bisa mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Badan publik bisa mendapatkan panduan tentang tata kelola informasi publik secara tertib, dan jaminan kepastian hukum tentang bagaimana tata kelola informasi publik yang mereka kelola. Masyarakat juga mendapatkan informasi publik yang dikelola dalam tata kelola yang tertib oleh badan publik, serta mendapatkan kepastian hukum saat mengajukan permohonan informasi publik.

Terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik, asas/prinsip utama Keterbukaan Informasi Publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi serta setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun untuk Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Pilar *Good Governance*, hal penting yang menjadi perhatian bagi sebuah Pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik. Informasi terkait kepentingan publik disosialisasikan dengan baik sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan warganya. Oleh sebab itu, penyediaan akses informasi publik yang baik sangat diperlukan. Sumber daya manusia di pemerintahan juga kunci penting untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

1. **Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.**
   1. **Permasalahan yang dihadapi Masyarakat berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan berwibawa, serta mengembangkan tatanan masyarakat informasi yang sehat. Diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 31 April 2010 secara nasional, merupakan tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran UU ini telah memberi instrumen hukum bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik yang sebelumnya dianggap *limited acces*. Kebijakan yang dahulu ada dianggap membatasi ruang dan gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sebagai *freedom of information act*, UU ini mengatur tentang pemenuhan kebutuhan informasi terkait dengan kepentingan publik. [Masyarakat](https://aceh.tribunnews.com/tag/masyarakat) menyambut antusias kehadiran UU KIP ini, karena telah memberikan penegasan bahwa hak mereka atas informasi sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Hak atas informasi diatur dalam Pasal 19, *Declaration of Human Rights* dan *International of Covenant on Civil and Political Rights*.

Data dari berbagai penelitian lembaga independen di dunia memperlihatkan dimulai tahun 2010, satu dari empat atau lima penduduk di dunia telah terhubung dengan internet. Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna teknologi informasi, penjualan piranti teknologi informasi/ komunikasi, nilai transaksi elektronik, penerapan teknologi berbasis internet, dan lainnya yang terkait dengan perkembangan TIK memperlihatkan peningkatan secara eksponensial. Pertumbuhan dan perkembangan yang meningkat secara drastis ini menjadi landasan trend pemanfaatan TIK secara lebih masif di seluruh dunia.

Lahirnya revolusi industri 4.0 berdampak terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi, di mana transparansi pelayanan dan informasi publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Informasi merupakan hak setiap manusia. Pemerintah selaku pelayan publik harus segera beradaptasi dengan kebutuhan dan karakter keterbukaan informasi. Revolusi Industri generasi keempat atau Revolusi Industri 4.0 memunculkan berbagai tantangan baru bagi masyarakat, pebisnis, industri dan pemerintah. Kenyataannya penduduk Indonesia (berbagai kalangan) merupakan pengguna internet hingga mencapai 54,68%, yaitu 143 juta dari total 243 juta penduduk.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dicanangkan sejak tahun 1999 sebenarnya membuka peluang bagi kabupaten/kota di Indonesia untuk berkembang dengan lebih cepat sesuai dengan kondisi-kondisi lokal maupun aspirasi di daerah, karena kabupaten/kota kini memiliki diskresi untuk melakukan hal tersebut. Beberapa kabupaten/kota memang telah dapat memanfaatkan kebijakan untuk menjadikan daerah mampu memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini masyarakat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan dampak perkembangan TIK. Karakteristik utama teknologi digital yaitu kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (*file*) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batas-batas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak-gerik keleluasaan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya.

Melalui penerapan TIK, manusia dengan mudah melakukan kegiatannya dimana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja. Batasan geografis seolah-olah menjadi hilang dengan adanya teknologi ini; sementara keterbatasan sifat-sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/tesk, gambar/citra, suara/audio, maupun film/video.

Terkait dengan kesepakatan dari Forum WSIS (*The World Summit on Information Society*) yang telah diselenggarakan di Jenewa dan Tunisia, di level Internasional, Indonesia harus memenuhi 10 (sepuluh) target WSIS, yaitu (1) Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membangun berbagai Pusat Akses Komunitas (*Community Access Point*); (2) Menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan TIK; (3) Menghubungkan seluruh pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan TIK; (4) Menghubungkan seluruh perpustakaan publik, museum, kantor pos, dan pusat arsip nasional dengan TIK; (5) Menghubungkan seluruh pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK; (6) Menghubungkan seluruh kementerian pemerintah pusat dengan TIK dan mengembangkan berbagai *Website* terkait dengan tupoksinya; (7) Menyesuaikan kurikulum sekolah dasar dan menengah agar para siswanya kelak siap menjadi individu yang berada dalam komunitas berbasis informasi, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan nasional; (8) Memastikan bahwa seluruh populasi di tanah air telah memiliki akses terhadap televisi dan siaran radio; (9) Memberikan semangat dan insentif pada industri pengembangan konten TIK dan mempersiapkan secara teknis digunakannya berbagai bahasa dunia melalui komunikasi berbasis internet; dan (10) Memastikan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia telah memiliki akses terhadap TIK di lingkungan mereka berada dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya.

Peranan strategis TIK dalam mempersiapkan diri untuk segera menjadi komunitas digital yang siap menghadapi berbagai perubahan jaman antara lain: (a) TIK merupakan infrastruktur kehidupan masyarakat modern, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan melakukan transaksi, interaksi, koordinasi, dan kolaborasi; (b) TIK merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia, Tanpa kehadiran TIK mustahil dapat diciptakan berbagai produk yang siap dikonsumsi seperti berita dunia, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya; (c) TIK merupakan piranti pendukung dan pemungkin berbagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh pemerintahan, bisnis/industri, organisasi, dan kemasyarakatan. (d) TIK merupakan pemicu dari terjadinya transformasi kehidupan bermasyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dipergunakannya TIK dalam proses pembelajaran (*e- education*), pemerintah (*e-government*), bisnis (*e-business*), dan lain-lain adalah bukti bagaimana teknologi mampu mengubah pola tindak individu dan komunitas dalam berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari. (e) TIK merupakan pendorong terciptanya daya saing yang signifikan bagi sebuah negara dalam konteks globalisasi. Saat ini begitu singkatnya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ijin usaha, mengurus pajak, melakukan investasi, membeli properti, dan sebagainya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi publik dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan perizinan yang selama ini telah dilakukannya. Penyempurnaannya terletak pada bagaimana kedua tugas tersebut dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang terkait. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah merubah paradigma dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta sekaligus mengawasi proses dari lahirnya sebuah kebijakan. Melalui praktik seperti ini potensi penyalagunaan kewenangan yang mungkin saja terjadi di birokrasi dapat dicegah seminimal mungkin.

Menarik untuk mencermati dinamika keterbukaan informasi publik yang terjadi di Indonesia. Di awal UU KIP diterapkan, pada tataran filosofis, keterbukaan informasi publik harus berhadapan dengan realita baik berupa kendala dan atau keseriusan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Masih ada praktik di lapangan yang hanya menggunakan keterbukaan informasi publik sebagai penerapan demokrasi setengah hati. Peraturan daerah yang intinya mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah dimiliki, namun pada praktiknya belum dilaksanakan di masing-masing unit kerja, misalnya dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di daerahnya, belum melakukan klasifikasi informasi publik yang dimilikinya, dan masih memutuskan informasi publik sebagai informasi dikecualikan yang harus dijaga kerahasiaannya.

Partisipasi yang dikembangkan selama ini sebatas partisipasi retoris dan cenderung manipulatif, hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih memandang masyarakat tidak penting dilibatkan dalam proses pembangunan (perencanaan, pembuatan kebijakan, penganggaran dan lain-lain) karena merasa telah diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Situasi ini menyebabkan belum kuatnya keinginan pemerintah daerah untuk merasa wajib melibatkan warga masyarakat. sehingga dibutuhkan instrumen kebijakan yang perlu untuk mengatur sistem aksesibilitas warga terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan peran serta masyarakat secara jelas, dengan memperhatikan berbagai aspirasi dan potensi masyarakat.

Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dihasilkannya kebijakan keterbukaan informasi publik. Demokrasi setengah hati yang banyak diterapkan pemerintah daerah, harus berhadapan dengan *euphoria* keterbukaan informasi publik yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat. Praktik keterbukaan informasi publik, memang perlu dikawal dan dicermati segala dinamika yang terjadi di ranah publik maupun yang terjadi di masyarakat.

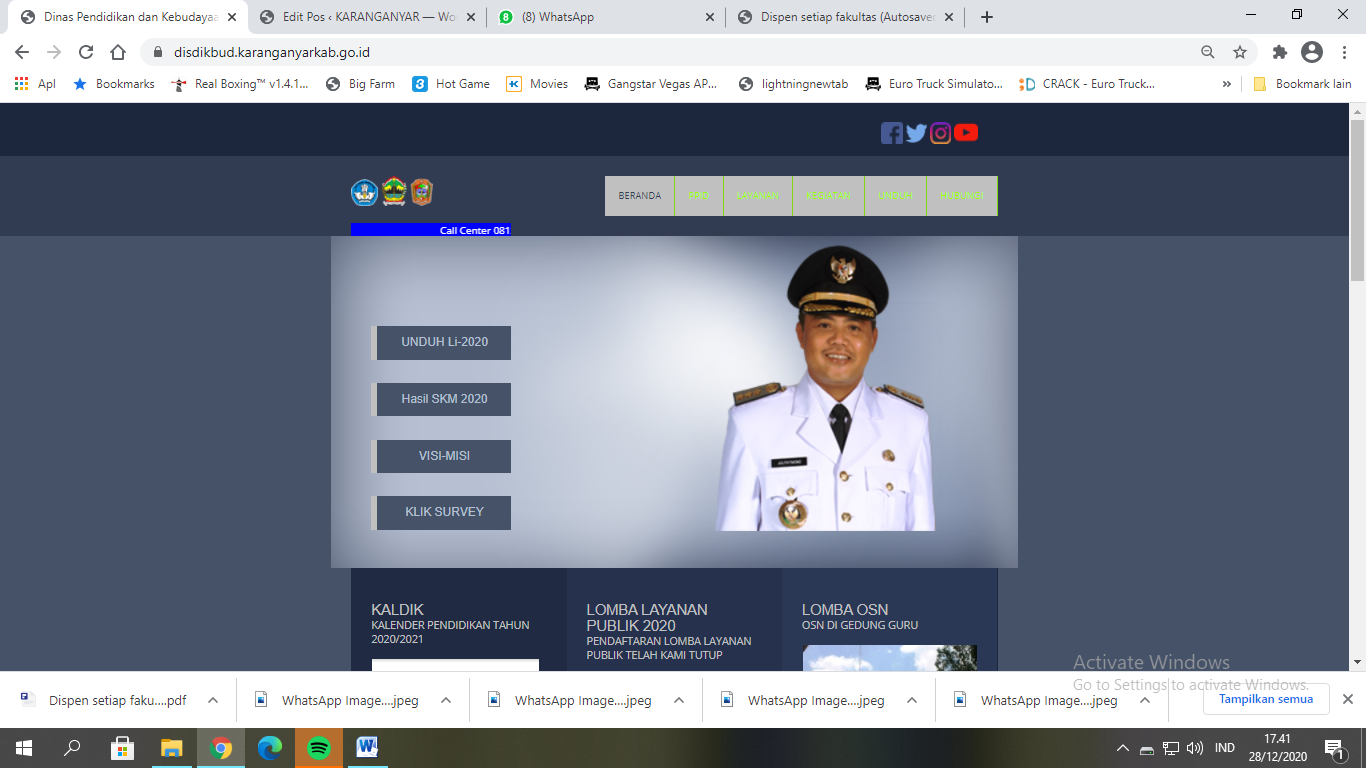
Masyarakat Kabupaten Karanganyar yang notabene *melek* teknologi, dapat dikatakan telah terbiasa mengakses informasi melalui internet. Sebagai warga negara, masyarakat juga pasti bersinggungan dengan pemerintahan untuk mengakses sesuatu, minimal saat pembuatan kartu tanda penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.” Sebanyak 80,4% responden menyatakan tidak dibebani biaya saat memperoleh informasi publik, sedangkan 15,6% responden menyatakan mengeluarkan biaya untuk mengakses informasi yang diperlukan. Keterbukaan infomasi publik di Karanganyar diharapkan dapat dilakukan dengan biaya seringan mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu terbebani untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

* 1. **Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Daerah**

Layanan informasi publik kepada masyarakat saat ini telah disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Karanganyar melalui Website dan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan beberapa situs web pemerintah, keterbukaan informasi publik masih perlu dilakukan pembenahan terutama pada pengkasifikasian informasi, kemudahan bagi pemohon dalam melakukan pencarian informasi, dan pemutakhiran data.

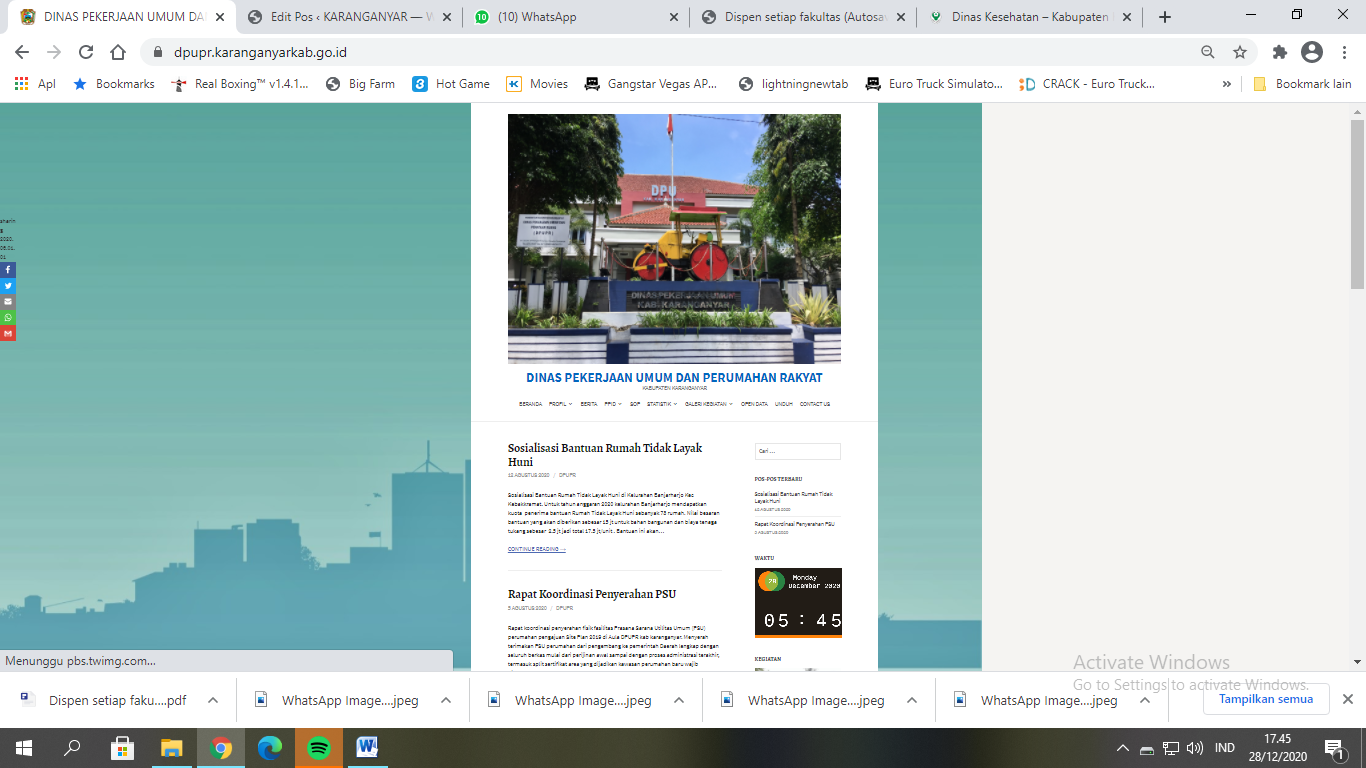
Persoalan kelembagaan yang masih dialami di antaranya komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk anggaran serta keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi.



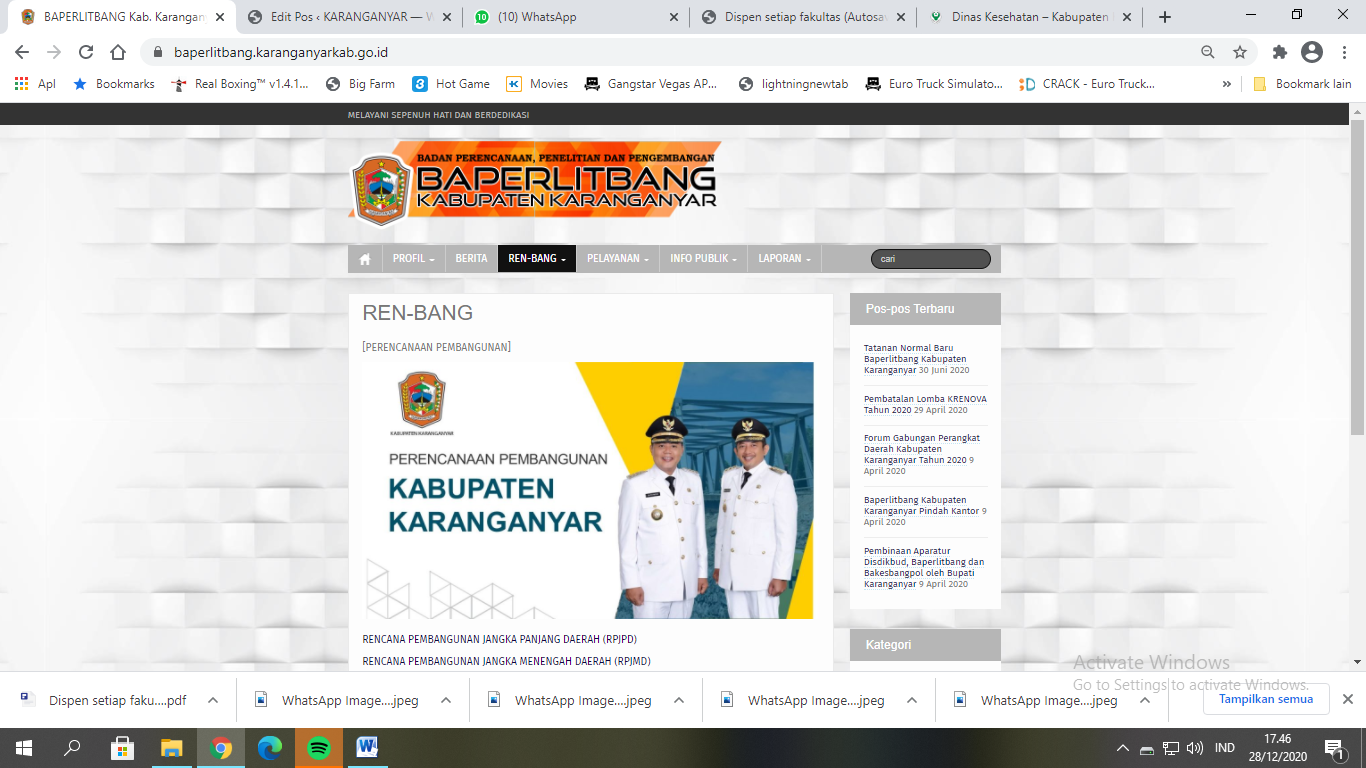
**Gambar 3**. *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar



**Gambar 4.** *Website* Dinas Kesehatan Karanganyar



**Gambar 5.** *Website* Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Karanganyar



**Gambar 6.** *Website* Badan Perencanaan dan Pembangunan KARANGANYAR

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi dari Tahun 2018-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi Umum:

Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit

yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan. Bahkan dari hasil monitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit Badan Publik yang membuat ringkasan akses informasi publik.

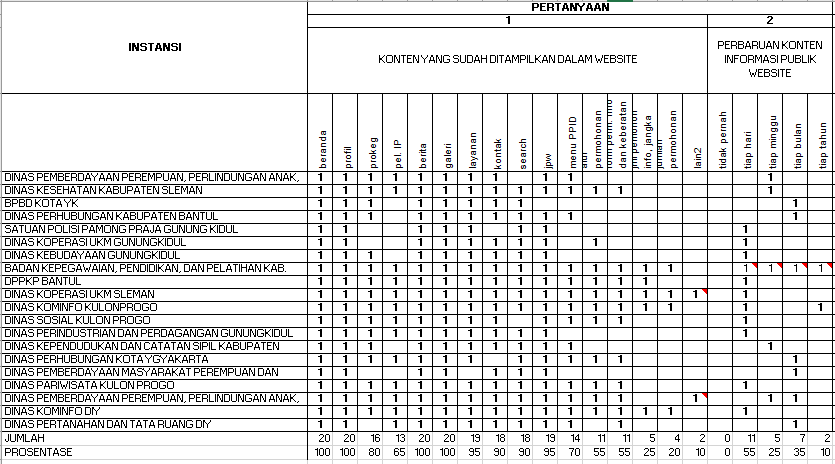
1. Catatan Khusus

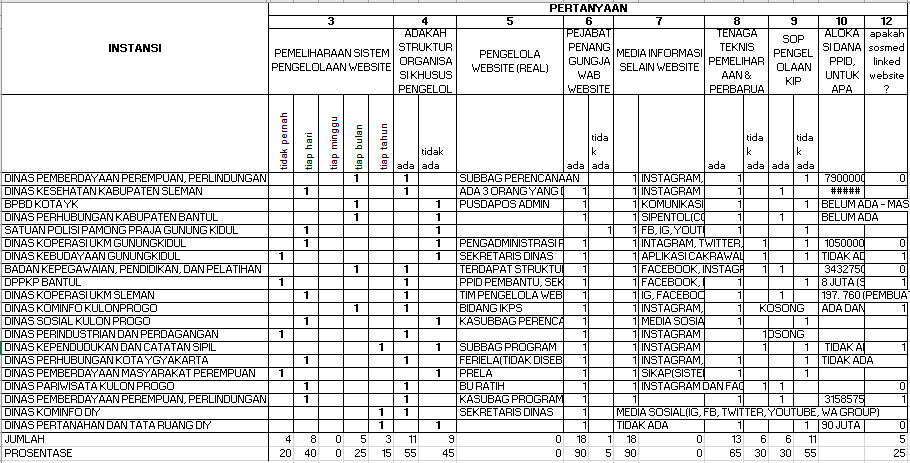
Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

* 1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
  2. Bagan Struktur Organisasi yang disediakan PPID Utama berupa bagan struktur organisasi PPID, padahal mestinya PPID Utama sebagai pengelola informasi publik Pemerintah Daerah, yang disediakan berupa Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
  3. PPID Utama yang sudah mempunyai *Website*, harus linked/terhubung dan dengan portal Pemerintah Daerah. Bahkan untuk efisensi, *Website* PPID Utama juga hendaknya menjadi sub domain Portal Pemerintah Daerah.
  4. Masih sangat sedikit Badan Publik yang menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul, dan sebagainya.
  5. Badan Publik perlu memberikan pertunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari informasi.

Pada kenyataanya, kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan. Berikut ini data yang diperoleh dari responden mengenai keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karanganyar.

**Tabel 2.** hasil wawancara personel PD KARANGANYAR





Berdasarkan tabel hasil wawancara dengan PD Karanganyar, diketahui bahwa 100% responden telah menampilkan beranda, profil, berita, dan galeri dalam *Website*nya. Menu layanan dan jumlah pengunjung web telah ditampilkan oleh 95% responden. Responden yang telah memberikan menu kontak untuk dihubungi dan fitur pencarian sebanyak 90%. Sebanyak 80% responden telah menampilkan program kegiatan mereka. Baru 70% dari responden yang telah mengaktifkan menu PPID mereka. Hal ini cukup mengganggu pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang. Sebanyak 65% responden telah menampilkan pelayanan informasi publik yang mestinya mereka publikasikan. Untuk mengakses informasi publik, masyarakat perlu mengetahui alur yang perlu diikuti, namun baru 55% dari responden yang telah menampilkan alur permohonan informasi, serta menyediakan form permohonan informasi dan penyampaian keberatan. PD yang telah menampilkan jumlah pemohon informasi dan jangka waktu pemberian informasi sebanyak 25% responden. Tentunya masyarakat berharap untuk mendapatkan respon cepat dan baik dari PD yang bersangkutan. Meski demikian, baru 20% dari responden yang telah menampilkan jumlah permohonan, termasuk responnya apakah diterima atau ditolak beserta alasannya. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja PD yang bersangkutan terkait kepercayaan publik untuk mengakses informasi, dan penerapan konsep *good governance*. Sebanyak 10% dari responden menampilkan menu lainnya seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kolom pembaca, serta menu dan konten seputar spesifikasi PD yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan benar, Badan Publik perlu melakukan perbaruan konten secara terus-menerus sesuai jenis informasi yang perlu dipublikasikan. Sebanyak 55% responden telah melakukan pembaruan konten setiap hari, 35% responden melakukannya setiap bulan, 25% melakukan setiap minggu, dan 10% yang melakukan tiap tahun. Pembaruan konten ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya peraturan perundang-undangan diperbarui tahunan, atau sesuai keluarnya peraturan tersebut. Konten berkaitan dengan agenda kegiatan diperbarui menyesuaikan dengan jadwal publikasi kegiatan tersebut. Bisa jadi, PD melakukan perbaruan konten berkala menyesuaikan kebutuhan publikasi.

Keterbukaan informasi publik harus didukung dengan sistem yang memadai. *Website* yang dimiliki oleh pemerintah perlu dirawat dan dilakukan pemeliharaan berkala untuk memaksimalkan penggunaannya. Harapannya, ketika masyarakat membutuhkan informasi dan mengakses *Website* pemerintah, *Website* tersebut aktif dan berfungsi dengan baik supaya informasi yang dibutuhkan segera diperoleh. Sangat disayangkan, masih ada PD yang tidak pernah melakukan pemeliharaan sistem pengelolaan *Website*. Sebanyak 40% responden mengatakan melakukan pemeliharaan sistem setiap hari, 25% responden melakukan pemeliharaan setiap bulan, 15% setiap tahun, dan 20% tidak pernah melakukan. Tentunya pemeliharaan ini membutuhkan biaya. Sayangnya, masih ada PD yang tidak memiliki alokasi anggaran biaya untuk melakukan pemeliharaan sistem.

PPID diharapkan dapat mengelola semua hal berkaitan informasi dan dokumentasi, termasuk pengelolaan *Website*. Saat ini, masih ada PD yang tidak memiliki struktur organisasi khusus untuk mengelola *Website* (45%). Sebanyak 55% responden telah memiliki struktur organisasi tersendiri untuk mengelola *Website* supaya terus *update* melakukan keterbukaan informasi publik dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. PD yang tidak memiliki struktur khusus memiliki kendala dalam publikasi konten informasi publik, karena adanya *double job* sehingga pekerjaan memperbarui konten informasi publik sering terbengkalai. Meskipun demikian, 90% responden mengklaim telah memiliki penanggung jawab *Website*.

Pada era digital seperti saat ini, di mana sebagian besar waktu masyarakat bersanding dengan gawai, media sosial diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki komunikasi, dalam rangka mewujudkan *good governance.* Tercatat sebanyak 90% PD telah memiliki media sosial atau media informasi lain selain *Website*. Media tersebut adalah Instagram, facebook, twitter, youtube, bahkan aplikasi-aplikasi yang khusus dibuat yang dapat dipasang pada telepon genggam sehingga lebih mudah diakses.

*Website* PD Karanganyar yang diharapkan menjadi pintu pertama untuk mengakses informasi publik telah dimiliki oleh mayoritas PD di Kabupaten Karanganyar. Lebih dari 70% PD telah menampilkan beranda, profil, berita, layanan, dan kontak yang mudah dihubungi. Sebanyak 65% PD telah menampilkan program kegiatan yang dilakukan dan diperbarui secara rutin. Jumlah PD yang menampilkan dokumentasi kegiatan khusus di menu galeri sebanyak 73% PD. Sementara itu, menu pencarian hanya terdapat pada 62% *Website* PD. Sedangkan PD yang menampilkan jumlah pengunjung *Website*nya yaitu sebanyak 51%.

Dengan PPID sebagai unsur utama keterbukaan informasi publik, diharapkan *Website* menampilkan menu khusus. Namun, 58% dari PD yang telah memiliki dan menggunakan menu tersebut. Selebihnya menu PPID pada webiste PD ada yang kosong dan tidak menampilkan informasi apapun, bahkan ada PD yang tidak memiliki menu PPID. Alur permohonan informasi dan keberatan telah ditampilkan oleh 38% PD, namun 40% PD telah menyediakan formulir untuk permohonan informasi dan keberatan yang bisa dengan mudah diisi oleh masyarakat. Sebanyak 11% PD telah menampilkan jumlah permohonan informasi dan jangka waktu pemberian layanan, sementara baru 9% PD yang menampilkan tanggapan permohonan, diterima ataupun ditolak beserta alasannya. Sebanyak 14% PD telah menampilkan menu lain sesuai kebutuhan publikasi informasi mereka, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, form survei, menu terkait spesifikasi PD, tanggapan masyarakat, dan lain-lain.

1. **Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan Dampaknya terhadap Beban dan Kewajiban Negara**

Kualitas informasi merupakan kualitas *output* berupa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi yang digunakan (Raiet al., 2002). Untuk menilai kualitas informasi terdiri dari beberapa dimensi, yaitu: *authenticity* (keaslian)*, accuracy* (ketepatan)*, completeness* (lengkap)*, uniqueness* (unik) *nonredudanc (*bukanduplikasi*), timeliness* (ketepatan waktu)*, relevance* (ada hubungan)*, comprehensibility* (dapat dipahami)*, precision* (ketelitian)*, conciceness* (keringkasan)*,* dan *informativeness* (keinformatifan)(Weber, 1999). Semakin baik kualitas informasi, akan semakin tepat pula keputusan yang diambil. Apabila informasi yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan berpengaruh negatif pada kepuasan pemakai. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal penyusunannya diekspektasikan dapat menghilangkan hambatan arus informasi publik, namun selama ini masih belum dapat dilihat hasilnya. Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi masih terbatas pada pemeringkatan dan tidak ada kajian mendalam terhadap faktor keberhasilan maupun kelemahan dalam implementasinya. Problematik yang terjadi dalam implementasi di badan publik secara mendasar akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai UU KIP. Hal tersebut akan menentukan arus informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah dengan warganya.

Hasil penelitian Nupikso (2017) juga menyebutkan kinerja badan publik dikategorikan sedang. Informasi mengenai anggaran publik masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik daerah. Secara umum badan publik daerah belum mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara baik karena faktor sumber daya, komitmen serta adanya disharmonisasi regulasi di antara pengambil kebijakan. Keterbukaan dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mensinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (*availability and accessibility*), penggunaan dan pendistribusian kembali (*reusability and redistribution*), dan partisipasi (*participation*).

Hasil penelitian yang dilakukan Alonso dan kawan kawan menyebut bahwa salah satu kendala implementasi UU KIP di Indonesia adalah lemahnya kompetensi badan publik dan rendahnya kesadaran para aktor pelaksana. Pada perkembangannya, Website tidak hanya dipergunakan untuk media publikasi, namun dapat dipergunakan untuk mengunduh dokumen bahkan untuk sarana transaksi antara pemerintah daerah dengan stakeholders. Secara umum tampilan Website Kabupaten Karanganyar berisi informasi mengenai profil dan informasi potensi daerah, baik potensi ekonomi, budaya, wisata maupun sumber daya alam. Masih minimnya publikasi tentang anggaran publik menjadi catatan penting, mengingat keterbukaan pengelolaan anggaran publik menjadi salah satu unsur utama penilaian terhadap keterbukaan pemerintah daerah.

Transparansi pengelolaan anggaran publik (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan daftar aset dan investasi, termasuk komitmen pemerintah untuk mengeliminir berbagai penyalahgunaan, juga bentuk tanggung jawab (*accountability*) pemerintah daerah kepada publik. Kinerja badan publik secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang baik. Informasi mendasar seperti pengelolaan anggaran publik masih sangat rendah. Rendahnya kinerja implementasi keterbukaan informasi publik juga disebabkan masih kurangnya kompetensi dan komitmen Badan Publik selaku implementor. Tersedianya informasi publik yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat informasi. Di sisi yang lain, kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi saat ini masih rendah, sehingga memerlukan upaya literasi tersendiri. Dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dipertimbangkan pula investasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Perlu dibandingkan apakah investasi tersebut benar-benar dapat memberikan lebih banyak manfaat dari pada biaya yang dikeluarkan.

Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengefektifkan *Website* resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolsui Industri 4.0, teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu:

1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan publik harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak (*mobile*) tanpa batas waktu dan lokasi.

2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.

3. *Internet of Things* (*IoT*) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan Informasi Publik diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.

4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan informasi publik diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

5. *Artificial Intelligence* (*AI*) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam layanan informasi publik berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk selalu terdepan dalam memberikan pelayanan yang handal dan berkualitas. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bagi pemerintah daerah adalah masih adanya masalah seperti:

1. SDM berkualitas tidak merata dan masih banyak PPID di daerah hanya sekedar formalitas tetapi tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola Infromasi Publik di daerahnya.

2. Tugas dan Fungsi (TUSI) tidak dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik, tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Komisi Informasi Publik masih perlu diperkuat sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat berjalan optimal.

4. Ketersediaan dana yang tidak didasari oleh program yang komprehensif sehingga tidak berkesinambungan.

5. Benturan kepentingan politik.

Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya landasan dalam perwujudannya, antara lain:

1. Sasaran dan komitmen (berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan pelanggan).
2. Pembiayaan yang memadai dan berkesinambungan.
3. Kompetensi sumberdaya dan fungsi organisasi yang bersinergi (*cross-functioned*).
4. Orkestrasi proses kerja prima yang berorientasi pelanggan dan berbasis pengetahuan.
5. Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran.
6. Ketersediaan Data Primer.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencarikan solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar.

Implikasi dari peraturan daerah tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan informasi yang lain untuk diketahui publik. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kinerja pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat luas.

## **BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Ada segi-segi penting yang perlu mendapat perhatian, ketika peraturan  
suatu daerah hendak dirumuskan dan disahkan. Pertama, keterjalinan tata  
perundang-undangan yang menjadi sumber dan acuan perumusan Peraturan  
Daerah yang ingin dibuat. Kedua, menganalisis Undang-Undang yang mengacu  
langsung pada Peraturan Daerah yang ingin dihasilkan, dalam hal ini adalah  
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, menurunkankan keterjalinan tata perundang-undangan dan temuan dari  
unsur-unsur serta materi dalam perundang-undangan tersebut ke dalam perumusan draf Peraturan Daerah.

Analisis perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik  
dengan demikian, mengarah pada keterjalinan peraturan perundang-undangan  
yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada, baik yang terkait  
atau yang berdiri sendiri. Analisis ini memberi pengetahuan, pemahaman, dan  
arah dalam melakukan perumusan suatu peraturan daerah yang ingin dibuat.  
Tujuan utamanya, agar peraturan daerah yang hendak dibuat, tidak keluar  
dari spirit Undang-Undang yang menjadi acuan utamanya, sekaligus di dalam  
ketentuan-ketenutan yang ada dapat dijabarkan ke dalam peraturan daerah yang  
lebih operasional dan kontekstual termasuk menghindari terjadinya kontradiksi-kontradiksi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang  
sudah ada dan dijalankan.

1. **Keterjalinan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagaimana telah dipaparkan, lahirnya peraturan perundang-undangan  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat dirunut secara filosofis, teoritis,  
sosiologis, yuridis dan secara praktis. Tata peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat mengacu pada Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Konvenan atau Konvensi Internasional, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang sudah ada dan dilaksanakan, dan peraturan-peraturan yang ada. Semua peraturan yang ada memberi keterjalinan terhadap urgensi dan relevansi sebuah undang-undang keterbukaan informasi publik.

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendorong lahirnya peraturan-peraturan di bawahnya, misalnya Peraturan Pemerintah baik di bawah kementerian terkait dan atau pada level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Pada level Internasional, *The Declaration of Human Rights*, menjadi  
acuan bagi lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di dunia,  
khususnya Pasal 19. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang  
berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya, hak ini mencakup  
kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan dan juga hak  
untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa  
pun dan tak boleh dihalangi.

Dari Pasal 19 The Declaration of Human Rights, teridentifikasi Hak-Hak  
yang berkaitan dengan Ekspresi, Komunikasi dan Informasi. Pertama, Hak  
Mengeluarkan Pendapat dan Berekspresi tanpa intervensi, Hak Mencari  
Informasi, Hak Menerima Informasi, dan Hak Menyebarkan Informasi dan Ide  
melalui media tanpa dihalangi.

Sedangkan pada Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) tanggal  
14 Desember 1946 disebutkan bahwa kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi standar dari seluruh kebebasan yang menjadi pusat perhatian semua.

Dalam Konstitusi kita, yakni UUD 1945 setelah diamandemen,  
menyebutkan hal ini secara eksplisit khususnya pada Pasal 28 F, yang dinyatakan  
bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Dasar pijakan untuk melakukan pembuatan Undang-Undang Keterbukaan  
Informasi Publik, dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (5) yang menyatakan  
bahwa:  
*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan  
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Kalimat “maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” menjadi sumber acuan bahwa  
undang-undang keterbukaan informasi publik perlu diterbitkan secara tersendiri.  
Fakta-fakta yuridis pun menguatkan tentang arti penting dan kedudukan  
keterbukaan informasi publik.

Misalnya di awal Gerakan Reformasi pada tahun 1998 bila dicermati, telah lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang ini menyinggung persoalan informasi khususnya Pasal 14 yang menyebutkan:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan  
   menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*.*

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) yakni:  
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas proporsionalitas.

Sejumlah peraturan perundang-undangan berikut ini menunjukkan adanya  
kesadaran tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, sebelum UU No 14  
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan dan setelah Undang-Undang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Kabupaten Karanganyar berada dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 27 disebutkan bahwa Karanganyar merupakan bagian dari Djawa Tengah.

Pembentukan Kabupaten Karanganyar disertai dengan penyerahan beberapa Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban sebagai Pemerintah Kabupaten untuk melakukan berbagai kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karanganyar sebagai Pemerintah Daerah merupakan badan publik sehingga memiliki kewajiban sebagaimana melakukan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Pasal 1 ayat (12)

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak  
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding  
atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan  
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam  
undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (24)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya  
peristiwa pidana.

Pasal 1 ayat (14)

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas  
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara  
yang diatur dalam undang-undang ini.

1. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum.**

Pasal 1 ayat (1)

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1)

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

1. **Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
   yang Bersih dan Bebas KKN**

Pasal 3

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

3. Asas Kepentingan Umum

4. Asas Keterbukaan

5. Asas Proporsionalitas

6. Asas Profesionalitas

7. Asas Akuntabilitas

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antar Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

* 1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara
  2. hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara
  3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara
  4. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
     1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
     2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

1. **Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, dibentuklah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UUD Tahun 1945 sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuat undang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Pasal 14 UU HAM merumuskan: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

1. **Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Pasal 2, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 ayat (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa “Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran

1. **Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Pasal 1 ayat (12) disebutkan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Pada Pasal 1 ayat (13), disebutkan “Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.” Pasal 1 ayat (14), disebutkan “Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.” Pasal 1 ayat (15) “Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.” Pasal 1 ayat (16) “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.”

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.” Pasal 2 ayat (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Ayat (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Pasal 5 ayat (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Pasal 5 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1. **Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang tersebut telah mengatur kewajiban-kewajiban Badan Publik terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik, yakni Pasal 7, yaitu :

* 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sampai saat ini bahwa kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan diraih oleh Undang-Undang tersebut. Hal ini didasarkan pada belum dilaksanakanya keterbukaan oleh instasi yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi pubik. Instansi atau Badan Publik belum melaksanakan keterbukaan informasi yaitu tidak membuka secara penuh informasi yang harus dibuka. Badan Publik tidak melaksanakan *updating* data dan informasi sebagaimana yang seharusnya, pengelola informasi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Apabila kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya Badan publik diancam dengan sanksi pidana. Pasal 52 telah menetapkan sanksi sebagai berikut: “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

1. **Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan,diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Definisi Kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan. Perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya (reliabel). Terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis,

Pasal 64 :

1. Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip,
2. Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip,
3. akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjelasan Pasal 64 di atas, arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum, akan tetapi apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, maka terhadap arsip tersebut dinyatakan tertutup setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diijinkan untuk dibuka apabila memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan oleh pencipta arsip.

Keterbukaan informasi dilakukan dengan membuka dokumen yang sifat dari sisi administrasi perkantoran merupakan dokumen yang dikategorikan sebagai arsip, bahkan arsip yang pasif. Namun demikian untuk kepentingan keterbukaan informasi publik maka diperlukan manajemen kearsipan yang baik dan dengan mudah dapat ditelusuri guna. Untuk itu, maka pengelolaan arsip dalam menunjang keterbukaan informasi publik sangat diperlukan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa pengelolaan arsip (terutama yang ada pada badan-badan publik) dibedakan antara pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip tersebut berkaitan dengan persoalan keterbukaan informasi publik, karena pengelolaan Arsip Statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan. Dalam peraturan pemerintah ini antara lain dijelaskan, bahwa Sistem Kearsipan Nasional berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Dengan demikian Pasal-Pasal dalam PP Nomor 28 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik antara lain Pasal 31 dan Pasal 37.

Pasal 31

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan:

1. penciptaan arsip;
2. penggunaan arsip;
3. pemeliharaan arsip; dan
4. penyusutan arsip.

Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

1. Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
2. Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
3. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
4. Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
5. **Undang-Undang RI No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.**

Pasal 1 ayat (8).

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d. dapat dilaksanakan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. kejelasan rumusan

g. keterbukaan”

Pasal 6 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman

b. kemanusiaan

c. kebangsaan

d. kekeluargaan

e. kenusantaraan

f. bhinneka tunggal ika

g. keadilan

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

i. ketertiban dan kepastian hukum

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

1. **Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah**

Demikian pula dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) yaitu:  
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas proporsionalitas.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya mencakup asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, asas efisien dan efektivitas. Asas-asas ini memiliki keterjalinan dengan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Persoalan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 391 mencakup:

1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah  
yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 392 disebutkan bahwa Informasi Pembangunan Daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah.

Selain itu, Pasal 393 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang kegunaan fungsionalnya digunakan untuk:

1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;

2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;

3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;

4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;

5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara  
nasional; dan

7) Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara**

Pasal 1 ayat (2).

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 ayat (1)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 3

(1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait.

(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

(1) Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa.

(2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai :

a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain;

b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan

c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Pasal 2 ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 2 ayat (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3 Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari : a. pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran; b. pertanggungjawahan akhir masa jabatan; c. pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Pasal 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

1. **Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Pasal 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasal 4. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 antara lain menentukan sebagai berikut:

1. Pertimbangan tertulis kebijakan badan publik;
2. Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
4. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda.
5. **Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan**

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Pasal 8 ayat (1) Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang.

(2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (1) Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Pemrakarsa.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pasal 10 Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang telah selesai diselaraskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari Pejabat Negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pelayanan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Menanggapi realita yang terjadi dalam birokrasi dan masyarakat terkait Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik seharusnya semakin memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang semakin bisa memperhatikan setiap kegiatan Pemerintah, sebaiknya bertindak bijak dengan berupaya mempelajari kekurangan dan permasalahan yang dilakukan maupun dihadapi oleh birokrasi dan kemudian mencari jalan keluar serta turut berperan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan dengan demo, anarkis atau hal lain yang menunjukkan amarah pada pemerintah. Di samping itu sosialisasi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya Pasal 13 tentang kewajiban Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh Badan Publik, karena PPID yang bertanggungjawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah**

Terkait dengan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di daerah, Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan:

1. Memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintahaan daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus mengupayakan agar informasi dan dokumentasi publik yang dikelola dapat diakses atau diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan mudah. Pada prinsipnya semua informasi dan dokumentasi yang ada pada pemerintah daerah bersifat terbuka, kecuali informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Pada tingkat daerah pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik dilakukan dengan membentuk PPID yang dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya didasarkan pada *Standart Operational Proccedure (SOP)* yang telah dibuat.

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota**

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mempergunakan pelayanan tersebut sehingga di dalam setiap pelayanan publik yang diberikan harus terdapat standar atau tolok ukur minimal sebuah pelayanan yang baik dan tepat guna. Sebuah informasi yang baik tentu memiliki standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan penanggungjawab informasi tersebut. Untuk mewujudkannya, harus terdapat pedoman baku yang dipergunakan sebagai pegangan, seperti di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 1.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2.

Dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik**.

Pengelolaan pelayanan informasi publik akan terlaksana dengan baik apabila terdapat forum yang mewadahi pengelolaan tersebut. Forum tersebut beranggotakan para pejabat pengelola informasi publik, maka dari itu dibentuklah Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 3

1. FKPPID mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta dukungan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKPPID mengadakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 4

FKPPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan kegiatan FKPPID dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID;
2. fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID; dan
3. asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. **Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

Pasal 2 menyebutkan bahwa “Peraturan ini bertujuan untuk: a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4 Badan Publik wajib: a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Pasal 5 “Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.”

Pasal 7 ayat (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik. (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.**

Pasal 2 Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan. Pasal 3 Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkada; c. PB KDH; dan d. peraturan DPRD.

Pasal 4

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. perda provinsi; dan

b. perda kabupaten/kota.

(2) Perda memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.

(5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:

a. kewenangan provinsi;

b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c. kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

1. **Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaikan Sengketa Informasi public**

Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meskipun demikian hak tersebut tetap dapat dibatasi oleh undang-undang, misalkan pembatasan yang dilakukan berdasar Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
   1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
   5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,dan/atau prasarana penegak hukum.
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
   1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
   2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
   3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
   4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
   5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkaitkerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
   6. sistem persandian negara; dan/atau
   7. sistem intelijen negara.
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
   1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
   2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
   3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
   4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
   5. rencana awal investasi asing;
   6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
   7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
   1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
   2. korespondensi diplomatik antar negara;
   3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
   4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
   1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
   2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
   3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
   4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
   5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.

Ketidakpahaman atau ketidaktahuan warga masyarakat mengenai pembatasan tersebut seringkali menimbulkan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi.

1. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

Materi muatan Peraturan Komisi Informasi meliputi:

1. Ruang lingkup Badan Publik dan kewajibannya dalam Pelayanan Informasi;
2. Tanggung jawab dan wewenang PPID;
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
4. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
5. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
6. Informasi yang dikecualikan dan tata cara pengecualian informasi publik;
7. Standar layanan informasi publik melalui pengumuman;
8. Standar layanan informasi publik melalui permohonan;
9. Maklumat pelayanan informasi publik;
10. Tata cara pengelolaan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
11. Laporan dan evaluasi oleh badan publik yang memberikan layanan informasi publik;
12. Penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik.

Peraturan oleh Komisi Informasi di atas dikeluarkan dengan tujuan:

1. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian harapan terkait layanan informasi yang diberikan oleh Badan Publik adalah:

1. terdapat standar yang sama bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. terjaminnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
4. terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**

Pasal 1.

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

5. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.

6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 4

(1) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.

(3) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

(5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 5

(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 6

(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota**

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika.

(2) SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. target standar pelayanan; dan

b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

(3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.

(4) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal BIdang Komiunikasi dan Informatika di Kabupaten Kota**

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik**

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

1. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik yang selanjutnya disingkat FKPPID, adalah organisasi nonstruktural yang menjadi wadah forum koordinasi dan kerja sama antar PPID Badan Publik. 4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Pasal 11 ayat (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi FKPPID di daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk FKPPID daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. (2) Anggaran kegiatan FKPPID daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Untuk kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan koordinasi di daerah, FKPPID daerah berkoordinasi dengan FKPPID.

Jelas bahwa ada hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dan  
kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, ada sanksi yang dapat dikenakan.

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

1. **Landasan Filosofis**

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”. Hal ini selaras dengan Pasal 28 F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Kristiyanto, E : 2016)

Di era globalisasi, akses terhadap segala informasi sangat terbuka dan seakan tanpa batas. Bentuk tanggung jawab penyelenggaraan negara adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Salah satu ciri pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang patuh pada norma hukum, menghormati nilai-nilai HAM dan mempunyai kekuasaan yang terbatas. (Raharjo, Gabriel dkk : 2017). Semangat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan beriringan dan memiliki hubungan kausal dengan semangat reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998, terutama dalam upaya memberantas penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Orang yang memberikan informasi tentang adanya perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme bukan harus saja dilindungi hukum, tetapi juga berhak mendapat penghargaan. Prinsip ini sebenarnya menunjukkan pentingnya sebuah keterbukaan informasi. (ICEL dan Yayasan Tifa. : 2009)

Keterbukaan informasi ini penting secara filosofis oleh karena: *pertama,* informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua,* hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga,* keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *keempat, pengelolaan* informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. (Kristiyanto, E. :2016)

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara, yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Secara filosofis, Mihradi menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin (Kristiyanto, E. :2016), yaitu:

* 1. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe).*
  2. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (access *to information).*
  3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate).*
  4. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistle blower protection).*
  5. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas.
  6. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal).*

Sementara itu, hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know).*
2. Hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meeting).*
3. Hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy);*
4. Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed).*
5. Hak untuk menyebarluaskan informasi (*right to disseminate).*
6. **Landasan Sosiologis**

Kultur budaya yang berkembang di masyarakat yaitu *ewuh pakewuh* (rasa segan) masih ada sampai saat ini. Budaya tersebut dihadapkan pada situasi demokrasi dengan sistem pemerintahan yang terbuka. Sekat budaya antara penguasa dengan rakyat menuntut perubahan menjadi lebih terbuka dan bertanggungjawab.

Tanggung jawab badan publik di antaranya menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara elektronik maupun non elektronik. Pendekatan kearifan lokal dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik Negara termasuk di tingkat desa. Pepatah yang mengatakan *desa mawa cara* (setiap desa memiliki aturannya sendiri) memberi makna pada pendekatan kultural bagi penyelenggaraan layanan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong pastisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ragam budaya setempat yang sering digunakan Badan Publik untuk menyampaikan informasi di antaranya melalui kesenian, forum warga, dan lain-lain. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, media penyampaian informasi bertambah dengan adanya *facebook, twitter, instagram, youtube* dan lain-lain. Oleh karena itu wilayah Karanganyar membutuhkan aturan dalam penyediaan konten informasi yang obyektif, akurat dan tidak menyesatkan.

Akibat kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat memunculkan konflik di masyarakat. Salah satu cara penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah melalui rembug warga atau musyawarah. Di dalam UU KIP, prinsip musyawarah ini terakomidir dalam tata cara penyelesaian melalui mediasi. Sebagaimana disampaikan Bupati Karanganyar mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publik bernafas falsafah *menang tanpo ngasorake*. Mekanisme mediasi juga menjadi bagian dari upaya mencari solusi terbaik tanpa harus ada kesan hutang budi akibat kebaikan yang telah diberikan atau dalam istilah birokrasi terjadi suap menyuap/*red tape* untuk mendapatkan informasi. Dampak dari budaya keterbukaan pada Badan Publik akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Masyarakat Kabupaten Karanganyar yang akan mencari informasi tidak bingung dan mengadukannya kepada pihak berwajib. Dengan hadirnya peraturan ini semua menjadi jelas, masyarakat yang mencari informasi dapat difasilitasi dengan baik menggunakan mekanisme yang diatur dengan rapi. Pencari informasi tidak lagi menjadi bingung karena informasi yang dibutuhkan bisa disajikan kapan saja.

1. **Landasan Yuridis**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi yang ada baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berbagai macam informasi menjadi penting untuk diberikan secara berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas segala informasi yang tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni dapat melalui informasi langsung yang diberikan melalui instansi-instansi yang tersedia, melalui media massa, media elektronik, maupun melalui internet. Dengan adanya berbagai macam media tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, seperti informasi yang terkait dengan lowongan pekerjaan, pertanahan, pertanian, industri, birokrasi, dan lain sebagainya. Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas segala informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu keakuratan dan keintensitasan di dalam pembaruan informasi selalu diperlukan.

Keterbukaan informasi perlu dibuat payung hukum atau peraturan sehingga antara pencari informasi dan pemberi informasi ada prosedur yang disepakati. Peraturan juga menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangan-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpeng tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah. Peraturan perundangan yang mengatur wilayah Karanganyar sehingga semua menjadi jelas karena ada aturan mainnya. Diharapkan aturan tersebut akan dapat menyelesaikan dan mendukung pemerintah dalam keterbukaan Informasi publik.

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Secara rinci untuk melaksanakan pelayanan informasi maka badan publik diwajibkan:

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi yang dikelolanya;
8. Menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Bagi Kabupaten Karanganyar sebagai daerah otonom, pembentukan peraturan daerah merupakan sebuah sarana yang strategis dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai wujud nyata pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang didasari oleh mandat yang diberikan oleh konstitusi sebagai hukum dasar pelaksanaan kewenangan maupun sebagai dasar dalam kaitannya dengan materi peraturan daerah. Untuk optimalisasi pelaksanaan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, di Kabupaten Karanganyat perlu disusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Proses penyusunan perda tersebut memperhatikan dan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dan rujukan yuridis, yaitu:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
11. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik.
19. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik;

## **BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

1. **Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Bahwa sasaran yang ada pada naskah akademik ini masih bias dan belum fokus pada inventarisasi permasalahan yang ada guna menentukan sasaran yang akan diwujudkan maka perlu melihat kembali pada inventarisasi permasalahan pada kajian di depan, kemudian baru menentukan sasaran yang ingin kita wujudkan.

Dalam Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggarakan negara yang terdiri dari asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan akan suatu negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas proporsionalitas. Tata kelola pemerintahaan mencakup asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas akuntabiltas, asas kepastian hukum, asas efisien dan efektivitas. Asas-asas ini memiliki keterjalinan dengan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Persoalan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 391 mencakup:

1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas:informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 391 tersebut mengamanatkan agar Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahaan daerah dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk pula informasi terkait pembangunan atau visi misi pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya, dalam Pasal 392 dtentukan bahwa Informasi Pembangunan Daerah memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah.

Selain itu, Pasal 393 dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang kegunaan fungsionalnya digunakan untuk:

1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan  
pengelolaan keuangan Daerah;

2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;

3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan  
daerah;

4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;

5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara  
nasional; dan

7) Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum, dibuat dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk di dalamnya adalah kepentingan akan keterbukaan informasi dari badan-badan publik. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini dibuat supaya ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat Karanganyar terkait dengan akses terhadap informasi dari badan-badan yang seharusnya memberikan pelayanan publik. Perlindungan terhadap masyarakat Karanganyar dapat diwujudkan jika peraturan daerah yang dibuat diterapkan dengan baik.

Pada satu sisi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan pada sisi yang lainnya informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu informasi harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama informasi dari badan-badan publik penyelenggara negara yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan. Dalam suatu negara demokratis, keterbukaan informasi dari badan publik penyelenggara negara dapat dipakai sebagai salah satu ukuran apakah penyelenggaraan negara telah mengikutsertakan warga negaranya atau tidak. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pada tataran nasional, Pemerintah Indonesia juga telah mengakui hak atas informasi sebagai hak asasi dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan dirumuskannya hak atas informasi dalam UUD 1945, maka hak atas informasi bukan hanya diakui sebagai hak asasi tetapi juga merupakan hak konstitusional. Hakikat dari pengakuan tersebut adalah hak atas informasi yaitu hak yang melekat pada diri seorang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.

Keterbukaan harus merata di berbagai level. Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi Pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memerintahkan kepada setiap badan publik Pemerintah atau Badan-badan Publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Menurut Mandica- Nur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai arti sangat penting sebagai dasar hukum bagi hal-hal sebagai berikut:

* 1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, beaya ringan/proporsional dan cara sederhana;
  3. pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas; (Mandica-Nur. N.G.B., (2009),

Berdasarkan UU KIP, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Guna mendukung dan mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih luas sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP, maka dibentuklah Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Keterbukaan Informasi Publik ini berkaitan dengan pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini arah pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini akan berimplikasi pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan informasi publik.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Arah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik memberikan dasar hukum terhadap hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik sebagai individu maupun warga negara. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap hak dan kewajiban badan publik sebagai penyedia informasi publik. Jangkauan pengaturan hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik.

Raperda ini juga akan mengatur pemutakhiran informasi publik. Arah pengaturan mengenai pemutakhiran informasi publik adalah dirumuskannya jangka waktu dan substansi pemutakhiran informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berkewajiban melakukan pemutakhiran informasi publik serta jangka waktu pemutakhiran.

Suatu layanan, termasuk layanan pemberian informasi dapat berjalan dengan baik jika terdapat monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Raperda ini juga akan mengatur mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Arah pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik adalah merumuskan mengenai standar monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Adapun jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.

Pengelolaan dan pemberian informasi publik yang baik tidak terlepas dari keberadaan Komisi Informasi Daerah. Berkaitan dengan hal itu Raperda ini juga akan mengatur mengenai Komisi Informasi Daerah. Arah pengaturan mengenai Komisi Informasi Daerah adalah kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Informasi Daerah. Adapun jangkauan pengaturannya adalah struktur Komisi Informasi Daerah, Kesekretariatan dan Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah.

Pengelolaan dan pemberian informasi publik yang baik juga tidak terlepas dari tersedianya pembiayaan. Oleh karena itu raperda ini juga akan mengatur mengenai pembiayaan, baik pembiayaan dalam pengelolaan informasi publik maupun pembiayaan untuk memperoleh informasi publik. Arah pengaturan mengenai pembiayaan, baik pembiayaan pengelolaan informasi publik maupun perolehan informasi publik adalah dialokasikannya pembiayaan pengelolaan informasi publik dalam APBD serta terumuskannya standar biaya untuk memperoleh informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah sumber biaya pengelolaan informasi publik serta besaran biaya untuk memperoleh informasi publik.

1. **Materi Muatan**

Istilah materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S. Attamimi, pada waktu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai pengganti istilah Belanda *het ondrwerp.* (Astawa & Suprin Na´a, : 2008)Istilah tersebut terdapat dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet”*. Dalam hal ini Attamimi mengatakan sebagai berikut:

“…dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan ThorbPecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”. (Astawa & Suprin Na´a, : 2008)

Lebih lanjut Attamimi mengatakan bahwa dalam konteks pengertian (*begripen*) materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, perlu diperhatikan apa yang seharusnya menjadi materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Hal itu perlu diperhatikan karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. (Astawa & Suprin Na´a, : 2008)

Diperhatikan karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut Sri Sumantri berpendapat, bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh Undang-Undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden. (Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R. Saragih : 1993).

Senada dengan Sri Sumantri, Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat baik dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. (Rosjidi Rangga Widjaja, : 1999),

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang tetapi juga pada semua rancangan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pedoman Nomor 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi ;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi ; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau Bab.

Lebih lanjut pedoman Nomor 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi materi muatannya adalah sebagai berikut:

**C. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

* 1. Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut dengan Daerah, adalah daerah Kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.
  4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
  5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  7. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.
  8. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
  9. Pengelolaan Informasi Publik adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik.
  10. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
  11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
  12. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
  13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
  14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
  16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
  17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
  18. Panitera adalah Sekretaris KID yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
  19. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan KID yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.
  20. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
  21. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

**D. Pengaturan substansi mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang meliputi:**

1. Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik
   1. Bagian Kesatu PPID
   2. Bagian Kedua KID
2. Informasi Publik.
3. Bagian Kesatu Umum.
4. Bagian Kedua Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.
5. Bagian Ketiga Pelayanan Informasi Publik.
6. Kewajiban Dan Hak Badan Publik.
7. Bagian Kesatu Kewajiban Badan Publik.
8. Bagian Kedua Hak Badan Publik.
9. Hak dan Kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.
10. Bagian Kesatu Hak Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.
11. Bagian Kedua Kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.
12. Pengawasan pelayanan Informasi Publik
13. Bagian Kesatu Laporan.
14. Bagian Kedua Monitoring.
15. Bagian Ketiga Evaluasi.
16. Peran Serta Masyarakat.
17. Pendanaan.
18. Bagian Kesatu Pendanaan Pengelolaan Informasi Publik.
19. Bagian Kedua Biaya Perolehan Informasi Publik.
20. Penutup.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Secara aturan dari Undang-undang, Perpres, Permendagri, Peraturan Menkominfo memang mengamanatkan bahwa keterbukaan informasi harus dilaksanakan oleh Badan Publik yang memperoleh dana dari APBD atau APBD. Naskah Akademik ini berusaha untuk mendorong lahirnya Perda yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Naskah Akademik ini sudah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Fakta menunjukkan bahwa badan publik di Kabupaten Karanganyar telah terdapat upaya untuk melaksanakan kewajiban hukum mewujudkan keterbukaan Informasi.

2.Terdapat begitu banyak peraturan yang telah dibentuk yang memberikan dasar untuk dilakukannya keterbukaan informasi publik yaitu adanya dasar hak yang secara kontitusional bagi masyarakat, adanya dasar kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi, adanya kewenangan untuk mengatur, adanya pedoman tentang substansi yang semestinya diinformasikan kepada publik, juga adanya dasar pengalokasian anggaran untuk pendanaan dan bahwa terdapat dasar pemberian sanksi jika tidak dilakukan keterbukaan informasi.

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung-jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap Hak dan Kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik. Arah pengaturan mengenai sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dalam peraturan daerah ini adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh Badan Publik untuk mendukung pemberian layanan atau penyediaan informasi publik, baik secara online maupun offline. Arah pengaturan mengenai Pemutakhiran Informasi Publik adalah dirumuskannya jangka waktu dan substansi pemutakhiran informasi publik. Guna memastikan terlaksananya keterbukaan informasi, maka aktivitas Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik menjadi salah satu hal yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan standar Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi maka Pendidikan dan Pelatihan PPID bagi aparat yang mengelola menjadi penting. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola informasi dan dokumentasi informasi daerah dapat melaksanakan kewajibannya secara profesional. Pembiayaan, baik Pembiayaan Pengelolaan Informasi Publik maupun Perolehan Informasi Publik diarahkan pada dialokasikannya pembiayaan pengelolaan informasi publik dalam APBD serta terumuskannya standar biaya untuk memperoleh informasi publik.

**B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di naskah akademik, saran yang diajukan antara lain:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Asas yang baik mencakup kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundangan-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahaan, ketertiban, dan kepastian hukum, kemudian kesiambangan, keserasaian dan keselarasan.

Perlunya pencermataan peraturan perundangan yang ada sehingga menjadi jelas hubungan antara Peraturan di atasnya dengan di bawahnya.

Bagi kepentingan perumusan peraturan daerah, perlu suatu tinjauan dan  
analisis yuridis. Peraturan Daerah dalam kedudukannya sebagai Lex Inferio, maka  
perlu suatu tinjauan dan analisis yuridis, dengan melihat keterjalinan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang ada, terlebih pada Undang-Undang No. 14  
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari hal ini adalah agar  
perumusan Peraturan Daerah yang nantinya dilakukan tidak keluar dari peraturan  
perundang-undangan di atasnya dan tidak terjadi kontradiksi-kontradiksi.

# Lex superior derogat legi inferior

Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah